



Massa PDIP Geruduk Kantor KPU Yogyakarta

● YULIANINGSIH

Mereka meminta kotak suara hasil pilkada disimpan di kantor kepolisian.

YOGYAKARTA — Seratusan massa PDIP Kota Yogyakarta yang menamakan dirinya Forum Penyelamat Demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Senin (20/2). Mereka menuntut agar KPU membuka kembali kotak suara yang berisi suara tidak sah dalam Pilkada Kota Yogyakarta. Pasalnya, PDIP mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam penghitungan suara tidak sah tersebut.

Mereka juga meminta agar kotak suara hasil Pilkada Kota Yogyakarta, 15 Februari lalu disimpan di kantor kepolisian. "Kami mempertanyakan netralitas KPU. Kami krisis kepercayaan terhadap KPU dalam pilkada kali ini, karenanya kami minta kotak suara diamankan di kantor polisi. Kami masih mempercayai lembaga kepolisian," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Yogyakarta, Fokky Ardiyanto, dalam orasinya di depan kantor KPU.

Massa PDIP tersebut datang ke kantor KPU Kota Yogyakarta sekitar pukul 12.00 WIB. Kantor KPU sendiri sudah dijaga ratusan polisi dan Brimob Polda DIY bersenjata lengkap. Beberapa mobil truk angkutan

polisi juga bersiaga membawa berbagai peralatan.

Sampai di halaman kantor KPU, massa PDIP yang menggunakan kaos hitam dan baju merah tersebut berkumpul di depan gerbang kantor KPU setempat. Gerbang masuk ke kantor KPU sendiri ditutup rapat dan dijaga barisan aparat kepolisian. Polisi juga menjaga tempat-tempat yang bisa digunakan masuk ke kantor KPU setempat.

Menurut Fokky, fakta di lapangan menunjukkan bahwa saksi dari PDIP melihat adanya surat suara sah untuk pasangan calon nomor 1 Imam-Fadli dimasukkan ke kotak suara tidak sah. "Namun di Kotagede dan Danurejan kotak suara tidak dibuka meski ada rekomendasi Panwascam," ujarnya.

Hai inilah uang menurutnya mengindikasikan ketidaknetralan penyelenggara pilkada di Kota Yogyakarta tersebut. Karenanya, sebelum rekapitulasi surat suara dilakukan dimulai di KPU mulai Rabu mendatang, pihaknya meminta kotak suara diamankan di kantor kepolisian.

Selain itu pada rekapitulasi surat suara nanti pihaknya meminta surat suara tidak sah untuk dibuka dan diperlihatkan secara transparan. "Surat suara tidak sah di Pilkada Kota Yogyakarta sebanyak 14 ribu lebih itu tidak logis," katanya.

Usai berorasi perwakilan massa PDIP mendatangi komisioner KPU di kantor KPU setempat untuk berdialog. Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto kemudian menemui masa aksi di depan kantor KPU. "Kami selalu menjaga sikap netral, kami bekerja diawasi pengawas pe-

Tindak Lanjut

☐ Negatif

☐ Amat Segera

☐ Untuk Ditanggapi

milihan dan dilihat oleh pemantau pemilu. Kami tidak ingin main-main. Kami bekerja untuk Yogya," ujarnya.

Menurut Wawan, pembukaan kotak suara tidak sah bisa dilakukan jika diperlukan. Pembukaan bisa dilakukan jika ada rekomendasi dari panwaslu. "Kami tidak menghalang-halangi itu sepanjang itu diatur dalam perundang-undangan. Kami akan berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan sesuai perundangan. Jika kami melanggar silahkan diadukan ke panwas," katanya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat kepolisian, panwas dan paslon lain di Pilkada Kota Yogyakarta terkait tuntutan massa aksi untuk menyimpan kotak suara di kantor kepolisian. "Kami akan berkoordinasi dengan para pihak. Panwas dan paslon serta aparat kepolisian. Jika semua mau tidak ada masalah," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta bersikap tegas dalam memproses laporan pidana pemilu yang telah dilaporkan. Eko berharap ketegasan panwas bisa membuat rakyat Yogyakarta percaya proses hukum atas tindakan Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono yang terbukti nyata melakukan kampanye dan diakui secara terbuka lewat media massa.

"ASN yang mengkampanyekan paslon jelas masuk ranah kasus pidana pemilu. Jangan digeser masalah administrasi, prosedur hukum pidana pemilu harus segera berjalan dengan pemeriksaan yang telapor

Plt Kepala Dinas Pariwisata," kata Eko Suwanto saat mendampingi saksi pelapor, Andi Kartolo, di sela dialog bersama dengan Ketua dan Anggota Panwas Kota Yogyakarta, dalam siaran persnya, Senin.

Saat dialog, terungkap bahwa panwas lalai tidak memberikan surat pemberitahuan kepada Andi Kartolo yang disebut tidak kuat *legal standing*-nya, dan hanya memberi tahu via SMS. "Andi Kartala terbukti sudah memiliki surat keterangan sebagai warga Yogyakarta dan telah melakukan rekam E-KTP. Kita harapkan Panwas Kota tak persoalkan ini dan bisa lanjut laporan pidana pemilu. Kita juga akan laporkan ini ke Inspektorat karena melanggar juga UU ASN," kata Eko Suwanto.

Ke depan, Eko mengajak agar semua pihak bisa mengawal proses pemeriksaan yang bersangkutan agar laporan rakyat Yogya tak berhenti dan penyelesaian jalur hukum bisa tegak. Terkait dengan aneka dugaan dan temuan praktik curang selama masa kampanye Pilkada Kota Yogyakarta, panwas harus bisa membongkar aksi politik uang. "Kami juga tengah mengumpulkan data dan bukti soal mobilisasi ASN, ada lagi laporan yang masuk ada empat pejabat pemkot segera kita ungkap secepatnya," kata politisi muda PDI Perjuangan itu.

Komisioner Bidang Penindakan dan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta, Pilkeska Hira Nurpika mengakui bahwa pemberitahuan sudah dilakukan via SMS kepada pelapor untuk segera melengkapi laporan. ■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005